



## ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025

<sup>1</sup>Endang Abubakar, <sup>2</sup>Nabila

<sup>1,2</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Sorong

email: [endang@um-sorong.ac.id](mailto:endang@um-sorong.ac.id)

### Abstract

This study aims to analyze the characteristics of poverty in Southwest Papua Province in 2025 across multiple dimensions, including poverty rates, education, employment, food expenditure, and housing facilities. The data are drawn from the National Socioeconomic Survey (Susenas) Consumption and Expenditure Module for March 2025 (VSEN25.KP), conducted by Statistics Indonesia (BPS). Poverty is measured using the Cost of Basic Needs (CBN) approach with the Foster-Greer-Thorbecke (FGT) formulation. The results show that the poverty rate in Southwest Papua reached 17.95 percent in March 2025, with a total poor population of 103.57 thousand people. The poverty depth index (P1) and poverty severity index (P2) were 4.527 and 1.723, respectively, reflecting that poverty is still concentrated well below the poverty line. In terms of education, the majority of the poor completed only primary/junior secondary education (50.11%). Regarding employment, half of the poor (50.15%) were not working. Food expenditure among the poor accounted for 57.94 percent of total spending, significantly higher than the non-poor (46.36%). Access to adequate housing facilities remains a challenge, particularly in Sorong Selatan and Tambrauw. These findings underscore the need for integrated policy interventions targeting education, economic empowerment, and basic infrastructure improvement.

*Keyword: poverty, Poverty Characteristics, Southwest Papua, FGT, Susenas*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 berdasarkan berbagai dimensi, mencakup tingkat kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran makanan, dan fasilitas perumahan. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025 (VSEN25.KP) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan pengukuran kemiskinan menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN) dengan formulasi Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Papua Barat Daya pada Maret 2025 mencapai 17,95 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 103,57 ribu jiwa. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) masing-masing sebesar 4,527 dan 1,723, yang mencerminkan bahwa kemiskinan di wilayah ini masih terkonsentrasi jauh di bawah garis kemiskinan. Secara pendidikan, mayoritas penduduk miskin hanya menyelesaikan pendidikan setingkat SD/SMP (50,11%). Dari sisi ketenagakerjaan, separuh penduduk miskin (50,15%) tidak bekerja. Pengeluaran untuk makanan penduduk miskin mencapai 57,94 persen dari total pengeluaran, jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk tidak miskin (46,36%). Akses fasilitas perumahan layak masih menjadi tantangan di beberapa kabupaten, terutama di Kabupaten Sorong Selatan dan Tambrau. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan terpadu yang menasar dimensi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur dasar.

*Kata Kunci: Kemiskinan, Karakteristik Kemiskinan, Papua Barat Daya, FGT, Susenas*

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, dan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan masih terus dihadapi. Untuk itu, diperlukan data yang akurat, mutakhir, dan terperinci sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi dampak intervensi terhadap kondisi penduduk miskin.

Di era otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing. Namun, seringkali keterbatasan data yang komprehensif mengenai kondisi rumah tangga miskin di tingkat daerah menjadi hambatan dalam merancang program yang efektif (Lestari & Widyaningsih, 2023). Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan ketersediaan data yang tidak hanya menggambarkan angka kemiskinan, tetapi juga menyajikan karakteristik multidimensi rumah tangga miskin, mencakup dimensi pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi, dan akses terhadap fasilitas perumahan.

Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya pada Maret 2024 tercatat sebesar 18,13 persen (BPS Papua Barat Daya, 2024), jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 9 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas pembangunan yang signifikan antara wilayah Indonesia Timur dan wilayah lainnya.

Beberapa faktor struktural yang memengaruhi tingginya angka kemiskinan di wilayah Papua antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, rendahnya partisipasi tenaga kerja di sektor formal, dominasi sektor pertanian subsisten, serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi (Way, Rorong, & T., 2025). Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif dan berbasis data.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984, mencakup periode 1976-1981 menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota, sehingga memungkinkan analisis

yang lebih mendalam pada level wilayah terkecil. Instrumen utama pengukuran kemiskinan ini adalah pendekatan kemampuan finansial memenuhi kebutuhan dasar (cost of basic needs), yang mengukur kemiskinan dari sisi pengeluaran per kapita per bulan. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penelitian mengenai karakteristik kemiskinan di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua, relatif masih terbatas dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Sumatera. Studi terbaru menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua bersifat kronis dan multidimensi, dengan akar masalah yang berbeda dari provinsi lainnya (Wijayanti et al., 2025); (Khotimah & Khalik, 2026). Dalam konteks kebijakan, pemahaman mendalam tentang karakteristik kemiskinan sangat penting agar program pengentasan kemiskinan dapat dirancang secara tepat sasaran dan efisien.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 berdasarkan data Susenas Maret 2025. Analisis dilakukan secara menyeluruh meliputi: (1) kondisi umum kemiskinan menurut kabupaten/kota; (2) profil pendidikan penduduk miskin; (3) kondisi ketenagakerjaan; (4) pola pengeluaran konsumsi; serta (5) akses terhadap fasilitas perumahan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkeadilan di Provinsi Papua Barat Daya.

## **2. LANDASAN TEORI**

Kemiskinan secara konseptual dapat dipahami dari berbagai pendekatan. Pendekatan moneter mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diukur dari tingkat pengeluaran atau pendapatan minimum. Pendekatan ini menjadi dasar pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS melalui metode Cost of Basic Needs (CBN) (Gibson et al., 2023). Di sisi lain, pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan juga keterbatasan akses terhadap fungsi-fungsi dasar kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial (Alfin & Boedirochminarni, 2025).

Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan di Papua dan wilayah Indonesia Timur menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Papua (Wijayanti et al., 2025). Studi ini

menemukan bahwa peningkatan IPM secara konsisten berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, sedangkan variabel PDRB dan tingkat pengangguran tidak selalu berpengaruh signifikan dalam konteks spesifik Papua. Temuan ini mengindikasikan bahwa investasi pada modal manusia merupakan strategi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam hal karakteristik pendidikan, penelitian di berbagai provinsi Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan melalui perannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia periode 2018-2023 menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat menekan tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui peningkatan HDI (Fayza et al., , 2025). Sementara itu, pengangguran terbukti berpengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula angka kemiskinan.

Aspek ketenagakerjaan juga menjadi determinan penting dalam struktur kemiskinan. Anggraini & Irfani (2023) menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, terutama pada kelompok rumah tangga yang bergantung pada sektor informal. Di Papua Barat Daya, dominasi sektor pertanian subsisten dan tidak bekerja pada penduduk miskin mencerminkan minimnya peluang kerja formal yang tersedia di wilayah tersebut. Way, Rorong, & T. (2025) dalam studinya di Kota Sorong menegaskan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya.

Dari sisi akses perumahan dan sanitasi, penelitian menggunakan data Susenas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Indonesia Timur menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengakses air layak dan sanitasi yang memadai. Putri, Laksono, & Rohmah (2023) menemukan bahwa kelompok miskin dengan pendidikan rendah memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap layanan kesehatan dan perumahan layak, yang pada gilirannya memperparah kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan-temuan di Kabupaten Sorong Selatan dan Tambrauw yang menunjukkan rendahnya akses terhadap air layak dan jamban layak.

Penelitian tentang dinamika kemiskinan kronis dan transien di Indonesia menunjukkan bahwa Papua dan Papua Barat memiliki komponen kemiskinan kronis yang paling tinggi, mencapai sekitar 73 persen dari total kemiskinan (Sugiharti et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Papua bukan sekadar fenomena sementara, melainkan bersifat struktural dan memerlukan intervensi jangka panjang. Studi Lestari & Widyaningsih (2023) menggunakan analisis spatial panel data mengonfirmasi adanya efek spasial

dalam distribusi kemiskinan di Pulau Papua, yang menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap geografi dan konteks lokal.

### **3. METODE PENELITIAN**

BPS menggunakan konsep kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar (cost of basic needs) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota tahun 2025 adalah data Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025 (VSEN25.KP). Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015).

#### **Penghitungan Indikator Kemiskinan Provinsi**

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2.100.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas konsumsi pengeluaran. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004). GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

### **Penghitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota**

Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota dan estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan. Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (1) Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-i digunakan elastisitas provinsi ke-j di level perdesaan, sedangkan untuk kota digunakan elastisitas di level perkotaan. Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan sister city).

(2) Menentukan P0 sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P0 provinsi ke-j periode t ke t-1 dengan P0 kabupaten ke-i pada tahun t-1. (3) Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P0 sementara. (4) Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi Foster-Greer-Thorbecke (FGT), yaitu:

$$P\alpha = (1/n) \sum [(GK - y_i)/GK]^\alpha, \text{ untuk } y_i < GK$$

di mana n adalah jumlah penduduk total,  $y_i$  adalah pengeluaran per kapita per bulan penduduk ke-i, GK adalah garis kemiskinan, dan  $\alpha$  adalah parameter yang mencerminkan sensitivitas terhadap kemiskinan. Ketika  $\alpha=0$ , P0 merupakan head count index (persentase penduduk miskin);  $\alpha=1$  menghasilkan P1 (indeks kedalaman kemiskinan); dan  $\alpha=2$  menghasilkan P2 (indeks keparahan kemiskinan). Penghitungan karakteristik kemiskinan menggunakan data penduduk miskin yang diidentifikasi berdasarkan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan masing-masing kabupaten/kota, kemudian dianalisis menurut dimensi pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran makanan, dan fasilitas perumahan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **Kemiskinan**

Tabel 1 menyajikan gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada Maret 2025 menurut kabupaten/kota. Secara keseluruhan, Papua Barat Daya mencatat persentase penduduk miskin sebesar 17,95 persen, meningkat 1,00 poin persentase dibandingkan September 2024 yang sebesar 16,95 persen. Jumlah absolut penduduk miskin tercatat sebanyak 103,57 ribu

jiwa. Angka ini menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,47 persen pada periode yang sama.

**Tabel 1. Indikator Kemiskinan Provinsi Papua Barat Daya Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2025**

<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (000)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)</b>
Raja Ampat	18,07	17,45	3,853	1,180	734.274
Sorong	24,74	13,17	2,470	0,592	684.838
Sorong Selatan	14,87	20,77	3,331	0,760	606.660
Maybrat	4,49	12,92	2,007	1,149	606.660
Tambrau	0,00*	0,00*	-	-	-
Kota Sorong	41,39	13,55	2,559	0,744	985.416
<b>Papua Barat Daya</b>	<b>103,57</b>	<b>17,95</b>	<b>4,527</b>	<b>1,723</b>	<b>812.630</b>

\*) Data Tambrau sementara belum tersedia. Angka dalam tanda tebal merupakan total provinsi. Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Terdapat variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota dalam hal tingkat kemiskinan. Kabupaten Sorong Selatan mencatat persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 20,77 persen, diikuti oleh Raja Ampat (17,45%) dan Kota Sorong (13,55%). Sementara itu, Kabupaten Maybrat mencatat persentase kemiskinan terendah di antara kabupaten yang tersedia datanya, yaitu 12,92 persen.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) agregat Papua Barat Daya sebesar 4,527 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada cukup jauh di bawah garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 1,723 mencerminkan adanya ketidakmerataan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Nilai P1 dan P2 yang relatif tinggi ini menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Papua Barat Daya tidak hanya perlu memperhatikan jumlah orang miskin, tetapi juga kedalaman dan keparahan kondisi kemiskinan yang dialami.

Kota Sorong, meskipun memiliki garis kemiskinan tertinggi (Rp985.416 per kapita per bulan), justru mencatat nilai P1 (2,559) dan P2 (0,744) yang relatif lebih rendah dibandingkan Raja Ampat dan Papua Barat Daya secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun standar biaya hidup di Kota Sorong sangat tinggi, distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskinnya relatif lebih merata dan mereka tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan.

## Pendidikan Penduduk Miskin

### *Pendidikan yang Ditamatkan*

Tabel 2 menunjukkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan. Secara agregat, sebagian besar penduduk miskin di Papua Barat Daya hanya mampu menyelesaikan pendidikan setingkat SD/SMP, yaitu sebesar 50,11 persen. Sementara itu, 35,72 persen telah menamatkan pendidikan setingkat SMA ke atas, dan 14,17 persen bahkan tidak menamatkan sekolah dasar.

**Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (%), Maret 2025**

<i>Wilayah</i>	<i>&lt; SD</i>	<i>Tamat SD/SMP</i>	<i>≥ SMA</i>
<i>Raja Ampat</i>	20,04	58,15	21,81
<i>Sorong</i>	13,55	54,81	31,64
<i>Sorong Selatan</i>	18,84	67,46	13,70
<i>Maybrat</i>	17,45	32,94	49,61
<i>Tambrau</i>	20,77	44,39	34,85
<i>Kota Sorong</i>	10,74	48,28	40,98
<b><i>Papua Barat Daya</i></b>	<b>14,17</b>	<b>50,11</b>	<b>35,72</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Profil pendidikan penduduk miskin bervariasi signifikan antar kabupaten. Kabupaten Sorong Selatan mencatat proporsi penduduk miskin yang hanya tamat SD/SMP paling tinggi (67,46%), sedangkan Kabupaten Maybrat justru memiliki proporsi penduduk miskin yang menamatkan SMA ke atas yang relatif tinggi (49,61%). Kota Sorong, sebagai pusat urban, memiliki proporsi terbesar untuk kategori pendidikan SMA ke atas (40,98%) di antara daerah perkotaan.

### **Angka Partisipasi Sekolah**

Tabel 3 menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk miskin untuk dua kelompok umur. Secara keseluruhan, APS kelompok umur 7-12 tahun di Papua Barat Daya mencapai 96,54 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD dari keluarga miskin sudah bersekolah. Namun, APS untuk kelompok umur 13-15 tahun (setara SMP) sedikit lebih rendah, yaitu 90,99 persen.

**Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kelompok Umur (%), Maret 2025**

<b>Wilayah</b>	<b>7-12 Tahun</b>	<b>13-15 Tahun</b>
Raja Ampat	99,51	79,92
Sorong	99,48	90,19
Sorong Selatan	92,44	98,64
Maybrat	97,06	100,00
Tambrau	100,00	92,40
Kota Sorong	94,52	88,55
<b>Papua Barat Daya</b>	<b>96,54</b>	<b>90,99</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Menariknya, Kabupaten Raja Ampat menunjukkan APS 7-12 tahun yang sangat tinggi (99,51%), namun APS 13-15 tahun turun drastis menjadi 79,92 persen. Hal ini mengindikasikan adanya putus sekolah yang signifikan pada masa transisi dari SD ke SMP di Raja Ampat. Sebaliknya, Sorong Selatan dan Maybrat justru mencatat APS 13-15 tahun yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

## **Ketenagakerjaan**

### **Status Bekerja**

Tabel 4 memperlihatkan distribusi penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut status bekerja. Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin di Papua Barat Daya (50,15%) tidak bekerja, sementara 34,96 persen bekerja di sektor informal dan hanya 14,89 persen yang bekerja di sektor formal. Kondisi ini menggambarkan rapuhnya basis ekonomi penduduk miskin di wilayah ini.

**Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja (%), Maret 2025**

<b>Wilayah</b>	<b>Tidak Bekerja</b>	<b>Sektor Informal</b>	<b>Sektor Formal</b>
Raja Ampat	51,75	33,24	15,01
Sorong	45,18	27,98	26,83
Sorong Selatan	21,45	77,34	NA
Maybrat	38,47	43,71	17,83
Tambrau	35,50	52,37	12,14
Kota Sorong	64,30	18,67	17,04
<b>Papua Barat Daya</b>	<b>50,15</b>	<b>34,96</b>	<b>14,89</b>

NA = Data tidak dapat ditampilkan karena nilai Relative Standard Error (RSE) lebih dari 50 persen. Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Kota Sorong mencatat proporsi penduduk miskin yang tidak bekerja paling tinggi (64,30%), yang mungkin mencerminkan tingginya biaya masuk pasar kerja formal di perkotaan bagi penduduk miskin. Sebaliknya, Kabupaten Sorong Selatan mencatat proporsi bekerja di sektor informal yang sangat tinggi (77,34%), mencerminkan dominasi mata pencaharian pertanian subsisten di wilayah pedesaan.

### Sektor Pekerjaan

Tabel 5 menyajikan distribusi penduduk miskin menurut sektor pekerjaan. Secara agregat, 28,00 persen penduduk miskin yang bekerja di Papua Barat Daya bergantung pada sektor pertanian. Kota Sorong sebagai kawasan urban memiliki proporsi sektor pertanian yang rendah (9,17%) dengan sektor bukan pertanian lebih dominan (26,54%). Kabupaten Sorong Selatan mencatat proporsi sektor pertanian tertinggi (77,34%), menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor primer.

**Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Pekerjaan (%), Maret 2025**

<i>Wilayah</i>	<i>Tidak Bekerja</i>	<i>Sektor Pertanian</i>	<i>Bukan Pertanian</i>
<i>Raja Ampat</i>	51,75	33,24	15,01
<i>Sorong</i>	45,18	27,98	26,83
<i>Sorong Selatan</i>	21,45	77,34	NA
<i>Maybrat</i>	38,47	43,71	17,83
<i>Tambrau</i>	35,50	50,62	13,88
<i>Kota Sorong</i>	64,30	9,17	26,54
<b><i>Papua Barat Daya</i></b>	<b>50,15</b>	<b>28,00</b>	<b>21,85</b>

NA = Data tidak dapat ditampilkan karena nilai RSE > 50 persen. Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

### Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan

Tabel 6 menampilkan persentase pengeluaran per kapita untuk makanan menurut status kemiskinan dan wilayah. Pola yang konsisten terlihat bahwa penduduk miskin mengalokasikan porsi yang jauh lebih besar dari pengeluarannya untuk makanan dibandingkan penduduk tidak miskin. Secara agregat, penduduk miskin Papua Barat Daya menggunakan 57,94 persen pengeluarannya untuk makanan, sementara penduduk tidak miskin hanya 46,36 persen.

**Tabel 6. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Status Kemiskinan (%), Maret 2025**

<i>Wilayah</i>	<i>Miskin</i>	<i>Tidak Miskin</i>	<i>Total</i>
<i>Raja Ampat</i>	59,34	47,27	47,81
<i>Sorong</i>	60,25	43,28	44,91

<b>Wilayah</b>	<b>Miskin</b>	<b>Tidak Miskin</b>	<b>Total</b>
Sorong Selatan	53,82	45,75	46,07
Maybrat	60,52	50,02	51,21
Tambrau	62,19	52,70	53,75
Kota Sorong	55,27	46,18	46,71
<b>Papua Barat Daya</b>	<b>57,94</b>	<b>46,36</b>	<b>47,18</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Kabupaten Tambrau mencatat proporsi pengeluaran makanan tertinggi di kalangan penduduk miskin (62,19%), diikuti oleh Maybrat (60,52%) dan Sorong (60,25%). Proporsi pengeluaran makanan yang sangat tinggi mengindikasikan adanya keterbatasan ruang fiskal bagi rumah tangga miskin untuk berinvestasi pada non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Selisih antara kelompok miskin dan tidak miskin dalam hal porsi pengeluaran makanan mencerminkan ketimpangan struktural yang perlu ditangani.

### Fasilitas Perumahan

Tabel 7 menyajikan akses rumah tangga miskin terhadap air layak dan fasilitas jamban sendiri/bersama. Secara keseluruhan, 75,46 persen rumah tangga miskin di Papua Barat Daya memiliki akses terhadap air layak, sementara 69,76 persen memiliki akses terhadap jamban sendiri atau bersama.

**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Akses Air Layak dan Jamban (%), Maret 2025**

<b>Wilayah</b>	<b>Air Layak (%)</b>	<b>Jamban Sendiri/Bersama (%)</b>
Raja Ampat	83,00	62,03
Sorong	76,10	88,28
Sorong Selatan	56,85	15,33
Maybrat	56,56	72,87
Tambrau	40,87	81,93
Kota Sorong	90,39	65,98
<b>Papua Barat Daya</b>	<b>75,46</b>	<b>69,76</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat Daya, 2025

Terdapat disparitas yang sangat mencolok antar kabupaten. Kota Sorong memiliki akses air layak tertinggi (90,39%), sementara Tambrau mencatat akses terendah (40,87%). Yang paling memprihatinkan adalah Kabupaten Sorong Selatan, yang hanya 15,33 persen rumah tangganya memiliki akses jamban sendiri/bersama, jauh di bawah rata-rata provinsi. Kondisi sanitasi yang buruk ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan penduduk miskin dan menciptakan siklus kemiskinan yang lebih dalam melalui peningkatan biaya kesehatan dan penurunan produktivitas.

## PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 bersifat multidimensi dan memiliki karakteristik yang berbeda antar kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan sebesar 17,95 persen secara agregat mencerminkan tantangan pembangunan yang masih sangat besar di wilayah ini. Angka ini konsisten dengan temuan BPS yang menunjukkan bahwa Papua Barat Daya mencatat kenaikan tingkat kemiskinan dari 16,95 persen pada September 2024 menjadi 17,95 persen pada Maret 2025, suatu tren yang berlawanan dengan penurunan di sebagian besar wilayah Indonesia lainnya (BPS, 2025).

Nilai indeks kedalaman kemiskinan ( $P1 = 4,527$ ) dan keparahan kemiskinan ( $P2 = 1,723$ ) yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Papua Barat Daya tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berada dalam kondisi kemiskinan yang dalam dan tidak merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang dinamika kemiskinan Indonesia yang menyatakan bahwa Papua dan Papua Barat memiliki komponen kemiskinan kronis tertinggi, mencapai lebih dari 73 persen (Sugiharti et al., 2023). Artinya, kemiskinan di wilayah ini bukanlah kondisi sementara yang dapat diselesaikan hanya dengan intervensi jangka pendek.

Profil pendidikan penduduk miskin memperkuat argumen bahwa rendahnya modal manusia menjadi salah satu akar masalah kemiskinan struktural di Papua Barat Daya. Mayoritas penduduk miskin (50,11%) hanya menamatkan SD/SMP, dengan variasi yang signifikan antar kabupaten. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar (7-12 tahun) sudah mencapai 96,54 persen, terdapat tantangan serius dalam mempertahankan anak tetap bersekolah pada jenjang SMP, terutama di Raja Ampat yang mencatat APS 13-15 tahun hanya 79,92 persen. Penelitian yang mencakup 34 provinsi di Indonesia menegaskan bahwa pendidikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan HDI, dan investasi pendidikan pada level menengah memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar pada penurunan kemiskinan (Fayza et al., 2025).

Dari perspektif ketenagakerjaan, dominasi penduduk miskin yang tidak bekerja (50,15%) dan bekerja di sektor informal (34,96%) mencerminkan keterbatasan pasar kerja formal di Papua Barat Daya. Anggraini & Irfani (2023) menegaskan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, terutama di daerah yang bergantung pada sektor informal. Kota Sorong yang mencatat proporsi tidak bekerja tertinggi (64,30%) menghadapi tantangan tersendiri, dimana tingginya biaya hidup urban tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup bagi kelompok miskin.

Sementara itu, dominasi sektor pertanian di Sorong Selatan (77,34%) dan Tambrauw (50,62%) menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada ekonomi subsisten yang rentan terhadap guncangan iklim dan fluktuasi pasar.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang sangat terkonsentrasi pada makanan (57,94%) mengindikasikan rendahnya kapasitas tabungan dan investasi rumah tangga miskin. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin miskin suatu rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran untuk makanan. Temuan ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya tentang pola konsumsi rumah tangga miskin di Indonesia Timur. Gap yang besar antara pengeluaran makanan kelompok miskin (57,94%) dan tidak miskin (46,36%) di Papua Barat Daya juga mencerminkan adanya jebakan kemiskinan, dimana penduduk miskin tidak memiliki cukup sumber daya untuk berinvestasi dalam modal manusia dan aset produktif yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Akses terhadap fasilitas perumahan layak, khususnya air bersih dan sanitasi, menjadi dimensi kemiskinan yang sangat kritis di Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong Selatan yang mencatat hanya 15,33 persen rumah tangga miskin dengan jamban layak menghadapi risiko kesehatan lingkungan yang sangat serius. Putri, Laksono, & Rohmah (2023) menemukan bahwa akses terbatas terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih secara langsung memengaruhi status kesehatan keluarga miskin dan produktivitas mereka, sehingga memperparah kondisi kemiskinan. Kabupaten Tambrauw dengan akses air layak hanya 40,87 persen juga memerlukan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Disparitas antar kabupaten/kota yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan kebijakan yang cocok untuk semua wilayah (*one-size-fits-all*). Kota Sorong dengan karakteristik urban memerlukan pendekatan yang berbeda dari kabupaten-kabupaten rural seperti Sorong Selatan dan Tambrauw. Studi tentang peran kota menengah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia menekankan pentingnya penguatan fungsi urban sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitarnya (World Development, 2023). Dalam konteks Papua Barat Daya, Kota Sorong memiliki potensi untuk memainkan peran tersebut, namun diperlukan kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih besar.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara berbagai dimensi kemiskinan. Kabupaten-kabupaten dengan tingkat pendidikan rendah cenderung juga memiliki proporsi bekerja di sektor informal yang tinggi dan akses perumahan yang buruk. Lestari & Widyaningsih (2023) dalam analisis spasial mereka menemukan adanya efek spasial dalam distribusi

kemiskinan di Pulau Papua, yang mengimplikasikan bahwa kabupaten-kabupaten yang berdekatan memiliki karakteristik kemiskinan yang saling terkait. Keterkaitan spasial ini penting dipertimbangkan dalam desain intervensi kebijakan agar dampaknya dapat menyebar secara lebih luas.

Secara keseluruhan, karakteristik kemiskinan di Papua Barat Daya tahun 2025 mencerminkan kondisi yang kompleks dan saling terkait. Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu, mengatasi sekaligus dimensi pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, dan infrastruktur dasar. Studi terbaru tentang jaring pengaman sosial di Indonesia menekankan pentingnya program perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis data untuk menjangkau kelompok miskin terdalam (Wahyuni et al., 2024). Investasi dalam kualitas SDM, perluasan lapangan kerja produktif, serta peningkatan akses infrastruktur dasar merupakan tiga pilar utama yang harus menjadi prioritas kebijakan di Papua Barat Daya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis karakteristik kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 berdasarkan data Susenas Maret 2025. Beberapa temuan utama dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya pada Maret 2025 sebesar 17,95 persen dengan jumlah penduduk miskin 103,57 ribu jiwa, meningkat dibandingkan September 2024. Nilai indeks kedalaman kemiskinan ( $P1 = 4,527$ ) dan keparahan kemiskinan ( $P2 = 1,723$ ) yang tinggi mencerminkan bahwa kemiskinan di wilayah ini bersifat dalam dan tidak merata, menandakan adanya kondisi kemiskinan kronis yang memerlukan penanganan jangka panjang.

Kedua, profil pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin hanya menamatkan SD/SMP (50,11%), dengan partisipasi sekolah dasar yang tinggi namun terdapat potensi putus sekolah pada jenjang SMP, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Ketiga, dari sisi ketenagakerjaan, separuh penduduk miskin (50,15%) tidak bekerja, dengan dominasi sektor informal dan pertanian subsisten di kabupaten-kabupaten rural. Struktur ketenagakerjaan ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan iklim, sehingga memerlukan diversifikasi mata pencaharian yang sistematis.

Keempat, pola pengeluaran penduduk miskin yang sangat terkonsentrasi pada makanan (57,94%) dibandingkan penduduk tidak miskin (46,36%) mencerminkan rendahnya kapasitas investasi modal manusia di kalangan keluarga miskin. Kelima, akses perumahan layak masih sangat rendah di

beberapa kabupaten, terutama Sorong Selatan dalam hal kepemilikan jamban (15,33%) dan Tambrau dalam hal air layak (40,87%), yang berdampak pada kualitas kesehatan dan produktivitas penduduk miskin.

Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini adalah perlunya program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis karakteristik wilayah. Program peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah perlu diprioritaskan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan semi-formal menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli rumah tangga miskin. Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, perlu dipercepat di kabupaten-kabupaten dengan akses rendah seperti Sorong Selatan dan Tambrau. Program bantuan sosial perlu diperbarui agar menjangkau penduduk miskin terdalam yang jauh dari garis kemiskinan.

Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan gambaran komprehensif tentang karakteristik kemiskinan Papua Barat Daya sebagai provinsi baru pada tahun 2025, yang dapat menjadi referensi berbasis data bagi perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Analisis multidimensi yang dilakukan memperlihatkan bahwa kemiskinan di Papua Barat Daya tidak dapat direduksi pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara keterbatasan pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, dan infrastruktur.

Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah ketidakterediaan data untuk Kabupaten Tambrau secara lengkap, serta nilai RSE yang tinggi untuk beberapa estimasi di tingkat kabupaten yang menyebabkan beberapa sel data tidak dapat ditampilkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data panel yang mencakup beberapa tahun sehingga dapat menganalisis dinamika perubahan kemiskinan dari waktu ke waktu di Papua Barat Daya. Selain itu, analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor determinan kemiskinan menggunakan model ekonometrika spasial juga akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang mekanisme transmisi kemiskinan di wilayah ini.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Papua Barat Daya perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis karakteristik wilayah. Peningkatan akses pendidikan menengah harus menjadi prioritas, terutama di daerah dengan potensi putus sekolah yang tinggi seperti Raja Ampat. Selain itu, perluasan kesempatan kerja produktif melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan dukungan terhadap sektor ekonomi lokal perlu ditingkatkan agar ketergantungan masyarakat pada sektor informal dan pertanian subsisten dapat dikurangi. Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi juga perlu dipercepat, khususnya di

Kabupaten Sorong Selatan dan Tambrau yang masih memiliki akses fasilitas dasar yang rendah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data panel atau data longitudinal agar dapat menganalisis perubahan kemiskinan secara lebih mendalam dari waktu ke waktu. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis dengan pendekatan ekonometrika spasial atau pendekatan multidimensi lainnya untuk memahami keterkaitan antar wilayah dan faktor-faktor dominan yang memengaruhi kemiskinan di Papua Barat Daya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, L. C., & Boedirochminarni, A. (2025). Determinants of Poverty in East Java: Education, Unemployment, and Minimum Wage. *GESDR: Journal of Social and Development*, 29(1). <https://doi.org/10.24123/gesdr.v29i1.7047>
- Wijayanti, D., Ramadhani, S. N. ., & Bintang SatrioWibowo. (2025). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art1>
- Anggraini, D., & Irfani, M. (2023). The effect of unemployment on poverty reviewed from an Islamic economic perspective. *Tirtayasa Economics*, 8(1), 123–138.
- BPS Papua Barat Daya. (2024). Profil Kemiskinan Papua Barat Daya Maret 2024. Sorong: BPS Provinsi Papua Barat Daya. Diakses dari <https://papuabarot.bps.go.id/en/pressrelease/2024/07/01/961/persentase-penduduk-miskin-papua-barat-daya-maret-2024sebesar-18-13-persen-.html>
- BPS Papua Barat Daya. (2025). Profil Kemiskinan Papua Barat Daya Maret 2025. Sorong: BPS Provinsi Papua Barat Daya.
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2016). Multidimensional poverty in Indonesia: Trend over the last decade (2003–2013). *Social Indicators Research*, 128(2), 559–587. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-1044-0>
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Jayanti, A. D., & Ridzuan, A. R. (2023). Indonesia's poverty puzzle: Chronic vs. transient poverty dynamics. *Cogent Economics & Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267927>
- Fayza, S., Sinambela, R. A., Situmorang, R. M., Nafisha, N., & Silaban, P. S. M. J. (2025). The effect of education and unemployment on poverty in Indonesia's 34 provinces (2018–2023): The mediating role of the human development index. *Jurnal Ekonomi Balance*, 21(1). <https://doi.org/10.26618/jeb.v21i1.16393>

- Khotimah, M. H., & Khalik, M. Y. (2026). The impact of the human development index and economic poverty in Sorong City Southwest Papua 2010–2024. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 7(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v7i1.33524>
- Lestari, D., & Widyaningsih, Y. (2023). Analysis of Factors Affecting Poverty in Papua Island Using Spatial Panel Data for 2017–2020. *Global Scientific and Academic Research Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(12).
- Putri, N. K., Laksono, A. D., & Rohmah, N. (2023). Predictors of national health insurance membership among the poor with different education levels in Indonesia. *BMC Public Health*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15292-9>
- Gibson, J., Jiang, Y., & Susantono, B. (2023). Revisiting the role of secondary towns: How different types of urban growth relate to poverty in Indonesia. *World Development*, 169, 106281. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106281>
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Administrasi Negara*, 5(2).
- Way, A. S. P., Rorong, I. P. F., & T., K. D. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2010–2023. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(3), 72–88.